

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM SYARIAH MENGHADAPI PASAR GLOBAL

Rukiah, SE., M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Abstract

In global competition market, most perceived challenge is available human resource. in development of Islamic economic system is felt there are imbalance in propivision of human resource. Long run startegic that can do. First, to support the financial educational institution and sharia business. Two, to make more regulation of human development. the third, Islamic economic socialization of community head. short run strategic is the first, to integrate the training and education of the Islamic economic system. Both increasing quality of supervision and monitoring system. Third optimizing BNSP Sertification for propesional work.

A. PENDAHULUAN

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

Adapun wujud dari realisasi atas kerjasama yang dimaksud adalah pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003, bahwa negara-negara ASEAN menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah *ASEAN Economy Community (AEC)*

atau yang lebih dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana MEA harus terbentuk pada tahun 2020.

Namun pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015.¹

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Dengan adanya MEA, tujuan yang ingin dicapai adalah adanya aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja (SDM) terlatih (*skilled labour*), serta aliran investasi yang lebih bebas.

Bagi Indonesia pembentukan MEA sangat mempengaruhi sistem perekonomian, dimana Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya khususnya dalam bidang ekonomi, karena jika dilihat dari segi kemajuan lembaga keuangan terutama dalam lembaga keuangan syariah, dengan data yang diperoleh dari penilaian Global Islamic Finance Report (GIFR) 2013, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan potensi pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Naik dua peringkat dari 2012.²

Perkembangan industri keuangan syariah dapat dilihat melalui perkembangan lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah yang semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah pada Oktober tahun 2013 yaitu Industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan meraup aset sebesar Rp.236 triliun.³

Kemudian pada triwulan kedua 2014, diperoleh perkembangan perbankan syariah dengan nilai aset industri perbankan syariah telah mencapai Rp.250,55 triliun.

Dari sisi perkembangan kelembagaan, jumlah lembaga keuangan syariah Indonesia juga terus bertambah. Hingga triwulan II 2014, jumlah perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 12 bank umum syariah (BUS), 21 unit usaha syariah (UUS), dan 163 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dengan total jaringan kantor mencapai 2.582 kantor, yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Sementara itu, hingga triwulan II 2014, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia telah mencapai 48 lembaga asuransi syariah dan 48 perusahaan pembiayaan syariah.

Tetapi, kemajuan perekonomian ini tidak didukung dengan adanya SDM yang berbasis syariah padahal kebutuhan akan SDM syariah sangat menentukan produktivitas, kinerja, dan kontinuitas lembaga keuangan syariah. Kekurangan SDM syariah selama ini banyak ditutupi oleh SDM konvensional yang secara keilmuan masih sangat minim terutama dalam bidang syariah dan ilmu-ilmu ekonomi syariah. Mereka hanya memperoleh pelatihan beberapa hari dan langsung disalurkan pada bank-bank syariah, sehingga pengetahuan tentang syariah hanya sedikit dan tidak memadai.

Untuk dapat mengembangkan lembaga keuangan syariah dan memanfaatkan peluang tersebut dibutuhkan tenaga profesional atau Sumber Daya Insani (SDI) yang tepat. Tepat dalam arti memahami betul konsep perbankan syariah, yang sesuai dengan konsep syariah dan mampu menjalankan roda industri perbankan dan jasa keuangan syariah yang memberikan nilai kepuasan bagi nasabahnya.

B. Fungsi Manusia dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk (Qs. Al-'Alaq/96:1-5) yang diciptakan sebagai "hamba" yang semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Swt. (Qs. Al-Zariat/51-52), dan dalam waktu yang sama juga

sebagai “khalifah” (Qs. Al-Baqarah/2:30) yang mendapat amanah untuk mengelola bumi, meraih keselamatan dan kemaslahatan dunia dan akhirat (*al-mashalih fi al-darain*) adalah keyakinan yang melandasi semua perilaku dan aktivitas manusia.⁴

Melalui derivasi kedudukannya sebagai “pengabd Allah” (*‘abd Allah*), manusia menampilkan jati dirinya sebagai makhluk yang senantiasa menjunjung tinggi moralitas (*al-akhlaq al-karimah*), sumber keunggulan dan kemuliaan diri. Sementara dengan kesadaran sebagai “khalifah Allah” manusia membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilannya memanfaatkan anugrah Allah.⁵

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Islam merupakan agama yang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai hal, diantaranya dalam aktivitas ekonomi, dimana kegiatan ini harus dilandaskan pada kaidah dan hukum-hukum Allah yang diatur dalam syariah Islam.

Praktek Ekonomi tidak terlepas dari adanya kegiatan lembaga keuangan karena untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut masyarakat membutuhkan institusi perantara atau lembaga intermediasi. Persaingan lembaga keuangan akhir-akhir ini sangat dititik beratkan pada ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal. Handal dalam artian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hanya itu perkembangan lembaga keuangan syariah belakangan ini sangat terkendala pada aspek manusianya, dimana sumber daya manusia yang ada di lembaga keuangan syariah itu belum sepenuhnya paham dan menghayati arti dan fungsinya sebagai SDM syariah yang benar-benar sesuai dengan ciri-ciri dan karakteristik yang Allah kehendaki di dalam syariah Islam.

C. Karakteristik SDM berbasis Syariah

Karakteristik dari SDM berbasis Syariah adalah SDM yang bercirikan tiga hal, yaitu: (1) *kafa'ah*, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan; (2) *himmatul-'amal*, yakni memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi; (3) amanah, yaitu bertanggung jawab dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas atau kewajibannya.⁶

1. *Kafa'ah*

Kafa'ah adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh SDM karena dengan *kafa'ah* maka pekerjaan yang dilakukan itu akan terlaksana dengan baik. Jika SDM itu ahli atau cakap dibidang pekerjaannya maka hasil pekerjaan yang nantinya diperolehnya akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasinya.

2. *Himmatul-'amal*

Himmatul-'amal adalah karakteristik yang juga harus dimiliki oleh seorang SDM. Karena seorang SDM yang profesional selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. SDM itu juga harus memiliki etos kerja yang tinggi. Islam mendorong setiap muslim untuk selalu bekerja keras serta bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam bekerja.

Dorongan utama seorang muslim dalam bekerja adalah bahwa aktivitas kerjanya itu dalam pandangan Islam merupakan bagian dari ibadah, karena bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban, dan hasil usaha yang diperoleh seorang muslim dari kerja kerasnya dinilai sebagai penghasilan yang mulia.⁷

Adapun hadis yang mendukung karakteristik *himmatul-'amal* adalah "*Tidaklah seorang diantara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri.*" (HR. Baihaqi)

3. Amanah

Selain memiliki kecakapan (*kafa'ah*) dan sifat *himmatul-'amal*, seseorang dikatakan profesional jika dia selalu memiliki sifat amanah, yakni Tunaikanlah amanah terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu terpercaya dan bertanggungjawab. Sifat amanah pada masa sekarang agaknya telah menjadi barang langka. Banyak orang yang ahli serta memiliki etos kerja yang tinggi, tapi karena tidak memiliki sifat amanah, justru memanfaatkan keahliannya untuk melakukan berbagai tindak kejahatan.⁸

„Rasulullah saw. memerintahkan setiap muslim untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Untuk mewujudkan karakteristik di atas Islam memberikan tuntunan yang sangat jelas.

1. *Kafa'ah*, diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan maka seorang karyawan/pegawai akan memperoleh tiga kompetensi. Pertama, kompetensi perilaku yaitu perilaku spesifik yang harus dimiliki untuk dapat menampilkan kinerja efektif. Diantaranya adalah, *analytical think, innovation, inf. Seeking, quality* dan *accuracy, flexibility, org savvy, self control* dan *rel building*. Kedua, kompetensi fungsional yaitu pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki untuk dapat menampilkan kinerja yang efektif. Inti dari kompetensi fungsional adalah *fundamental of syari'ah banking, banking operation, financing adm* dan *reporting* dan *financing anlysis*. Ketiga, kompetensi *role* yaitu karakteristik yang harus dimiliki untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan kelompok (unit kerja). Isinya adalah *team leadership, strategic orientation, leading change* dan *developing others*.⁹

nasib suatu kaum dari kesusahan apabila kaum itu tidak memiliki motivasi untuk merubah ke arah yang lebih baik.¹⁰

Selain dorongan ibadah, seorang muslim juga dapat bekerja keras karena adanya keinginan untuk memperoleh imbalan atau penghargaan (*reward*) materiil dan nonmateriil seperti gaji atau penghasilan, karier dan kedudukan yang lebih baik serta pujian, dan sebagainya.

Diperbolehkan juga seorang muslim bekerja keras karena dia khawatir terhadap hukuman (*punishment*) yang akan diterima, baik hukuman tersebut berupa penghasilan yang berkurang, karier yang mandek, maupun jabatan yang rendah. Semuanya ini boleh dilaksanakan selama sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan motivasi utama dia bekerja keras adalah karena melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.¹¹

3. Amanah diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai unsur pengontrol utama tingkah laku.

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT (*ihsan*).

Sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku, perusahaan, masyarakat, bahkan negara. Sebaliknya, sikap tidak amanah (khianat) tentu juga akan berdampak buruk.

D. Langkah-langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan SDM berbasis Syariah

Permasalahan yang berkaitan dengan SDM dan strategi pengorganisasian dapat dijawab oleh Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya dengan langkah jangka panjang.

Optimalisasi SDM dalam jangka panjang adalah:

1. Mendukung berdirinya lembaga pendidikan yang konsentrasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah.¹²

SDM Ekonomi Syariah yang tangguh tentu tidak bisa dilahirkan secara instan. Dibutuhkan sebuah program pendidikan yang terencana, sistematis dan mampu menjawab kebutuhan pasar masa depan. Dalam konteks inilah, lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengelola pendidikan ekonomi syariah merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan. Dari lembaga pendidikan tinggi akan lahir SDM Syariah yang paripurna, yang menguasai ilmu ekonomi konvensional, menguasai ekonomi kontemporer dan sangat menguasai ilmu-ilmu syariah khususnya ekonomi Islam.¹³

Selain perguruan tinggi, peningkatan pendidikan mengenai ekonomi syariah juga dapat dilakukan dengan membuat kurikulum tentang ekonomi syariah yang diajarkan kepada SMK atau SMA, mengingat Negara Indonesia merupakan negara mayoritas muslim.

Walaupun sesungguhnya yang ingin dilahirkan adalah SDM yang berbasis syariah. SDM yang handal pada hakikatnya harus diletakkan di atas fondasi kesadaran spiritual (hamba Allah) dan rasional (khalifah Allah). Tidak ada pertentangan antara kesadaran spiritual dengan kesadaran rasional dalam ekonomi syariah. Sebagai hamba Allah, manusia menjadi makhluk yang taat yang senantiasa melakuka perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan sebagai khalifah Allah, manusia menjadi makhluk yang sukses dan berhasil melalui dukungan ilmu pengetahuan.

SDM yang ingin dihasilkan juga harus SDM yang integratif, SDM yang bukan hanya sekedar memahami ilmu ekonomi syariah dan konvensional melainkan harus ahli dikedua bidang itu. Disamping itu SDM Syariah atau SDM Islami yang dikembangkan adalah yang memiliki akhlak dan kompetensi yang dilandasi sifat yang dapat dipercaya (amanah), memiliki integritas yang tinggi (*siddiq*), dan senantiasa membawa dan menyebarkan kebaikan

(*tabligh*) serta memiliki keahlian dan pengetahuan yang handal (*fathanah*).¹⁴

Tanpa SDM yang handal, pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber lainnya menjadi tidak berguna dan berghasil guna.¹⁵

2. Regulasi mengenai SDM

Dalam hal regulasi, Pemerintah Indonesia sudah cukup banyak membantu keuangan syariah, namun masih tidak setara tingkat keberpihakannya, jika dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga yang menyuplai SDM berkualitas yaitu lembaga INCEIF (*International Centre for Education on Islamic Finance*), yang merupakan lembaga diberi modal secara khusus oleh pemerintahannya melalui Bank Negara Malaysia (BNM) pada 2002. Bukan APBN, tetapi semacam dana abadi yang diinvestasikan di pasar keuangan syariah. Bersama INCEIF, *Islamic Shariah Research Academy for Islamic Finance* (ISRA) juga didanai melalui cara yang sama. ISRA adalah lembaga *think thank* keuangan syariah Malaysia.¹⁶

Di Indonesia sendiri ada lembaga yang mengembangkan SDM di bidang keuangan syariah yaitu ICDIF yang berada dibawah Lembaga Pengembangan Perbankan Syariah (LPPI). LPPI dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Yayasan Bank Indonesia (BI). Jika INCIEF diinisiasi 2005, ICDIF baru pada 2008 yang merupakan peralihan dari Direktorat Syariah LPPI.¹⁷

Dengan melihat hal itu maka seharusnya di Indonesia pemerintah membentuk suatu badan atau instansi yang khusus menangani Lembaga Keuangan Syariah beserta SDM dan operasionalnya. Hal ini bisa saja dilakukan dengan membuat satu komisi di DPR yang nantinya akan membahas mengenai keuangan syariah dan akselarasi pengembangan lembaga keuangan secara

husus syariah dan ekonomi secara umum. Walaupun peran BI dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah sudah beralih ke otoritas jasa keuangan (OJK), namun lembaga ini telah menunjukkan peran signifikan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah.

3. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara menjelaskan kepada masyarakat mengenai produk dan sistem bagi hasil yang dijalankan di Lembaga Keuangan Syariah, baik itu dilakukan oleh lembaga terkait maupun lembaga lain seperti lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Yang nantinya akan membantu masyarakat memahami tentang Lembaga Keuangan Syariah itu agar dapat tercipta SDM yang nantinya mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah sehingga SDM itu dapat dipekerjakan di suatu perusahaan yang berbasis syariah.

E. Persiapan SDM berbasis Syariah dalam menghadapi MEA

Kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi. MEA yang akan diberlakukan pada Desember 2015, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan sosial dan pengembangan budaya.

AEC Blueprint ditandatangani oleh kepala Negara ASEAN di Singapura tanggal 20 November 2007. Merupakan pedoman bagi Negara-negara ASEAN untuk mencapai AEC 2015 dan masing-masing Negara berkewajiban melaksanakan komitmen dalam Blueprint tersebut.

Terdapat 4 Pilar ASEAN Economic Community (AEC) :¹⁸

1. Terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal

Yaitu: (1) Bebas arus barang; (2) Bebas jasa; (3) Bebas investasi; (4) Bebas tenaga kerja; (5) Bebas arus permodalan; (6) *Priority integration sectors*; (7) Pengembangan *sector food agriculture forestry*.

2. Kawasan berdaya saing tinggi.

Yaitu : (1) Kebijakan persaingan; (2) Perlindungan konsumen; (3) Pembangunan infrastruktur; (4) Kerjasama energi; (5) Perpajakan; (6) *E-commerce*.

3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata

Yaitu : (1) Pengembangan UKM; (2) Mempersempit kesenjangan pembangunan antar Negara ASEAN.

4. Integrasi dengan perekonomian dunia.

Yaitu : (1) Pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal; (2) Partisipasi yang semakin meningkat dalam jaringan suplai global

4 hal yang harus diantisipasi dalam AEC:

1. Implementasi AEC berpotensi menjadikan Indonesia sekedar pemasok energy dan bahan baku bagi industrilisasi dikawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam minimal.
2. Melebarnya deposit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan barang.
3. Implementasi AEC juga akan membebaskan aliran tenaga kerja sehingga harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing.
4. Implementasi AEC akan mendorong masuknya investasi ke Indonesia dari dalam luar ASEAN.

Untuk menghadapi adanya implementasi AEC mengenai pembebasan aliran tenaga kerja maka strategi yang harus segera

dilakukan adalah dengan optimalisasi SDM syariah dalam jangka pendek yaitu:

1. Mengintensifkan kegiatan pelatihan mengenai sistem Ekonomi Syariah.

Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁹ Kegiatan pelatihan dilakukan dengan harapan adanya peningkatan pengetahuan yang berbasis syariah untuk karyawan. Dalam kegiatan tersebut akan dijelaskan kepada karyawan mengenai karakteristik produk-produk ekonomi syariah secara rinci dan juga penjelasan tentang bagi hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut agar tidak terjadi penyimpangan yang nantinya membuat masyarakat tidak percaya terhadap lembaga-lembaga syariah. Serta dengan kegiatan ini diharapkan para karyawan memiliki rasa *loyalitas* yang tinggi sehingga karyawan dapat menjelaskan produk kepada masyarakat dengan kreatif dan inovatif.

2. Peningkatan kualitas pengawas dan sistem pengawas

Untuk mengoptimalkan SDM berbasis syariah tidak hanya dapat dilakukan dengan pelatihan saja karena seseorang bisa saja menyimpang dari aturan jika tidak ada yang mengawasinya. Oleh sebab itu diperlukan kualitas pengawas yang baik serta sistem pengawasannya.

Selain itu jumlah pengawas juga ditambah agar kecurangan dapat diminimalisir. Bank Indonesia merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian dalam hal menyikapi perkembangan industri yang semakin berkembang dengan cara penyesuaian institusi pengawasan pada aspek struktur organisasi pengawasannya maupun jumlah SDM pengawas.

3. Pembuatan sertifikasi oleh BNSP kepada tenaga kerja yang sudah profesional

BNSP adalah singkatan dari badan nasional sertifikasi profesi.²⁰ Badan ini bertugas membuat sertifikasi kepada tenaga kerja yang ada di Indonesia agar dapat bersaing di negara ASEAN. Hal ini harus didukung dengan dilakukan pengetatan atau proteksi masuknya para tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. Karena di negara ASEAN lainnya sertifikasi ini sudah diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan melihat negara Singapura yang mengharuskan sertifikat CFA level 1 dalam bidang keuangan sehingga tenaga kerja yang ada di Indonesia tidak dapat dengan mudah masuk kesana.

Oleh sebab itu Indonesia perlu membuat sertifikasi kepada tenaga kerjanya agar dapat diterima di negara ASEAN lain yang nantinya tidak membuat negara Indonesia ketinggalan atau tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dengan tenaga kerja yang ada di negara ASEAN lainnya.

Sertifikasi ini harus segera diselesaikan pada tahun 2015 ini. Hal ini agar Indonesia tidak ketinggalan dengan negara di ASEAN lainnya. Karena jika tidak diselesaikan maka kemungkinan besar akan menutup peluang pekerja asal Indonesia untuk bersaing di negara-negara ASEAN mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku di 2015 ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi manusia dalam ekonomi Islam adalah manusia menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ciri-ciri dan karakteristik yang Allah kehendaki di dalam syariah Islam
2. Karakteristik SDM Syariah yang diharapkan muncul di tengah - tengah persaingan menghadapi MEA adalah yang memiliki ciri srbagai berikut:

- a. *Kafa'ah*, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan.
 - b. *Himmatul-'amal*, yaitu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi.
 - c. Amanah, yaitu bertanggung jawab dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas atau kewajiban.
3. Strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi MEA untuk jangka panjang adalah pemerintah diharapkan melakukan hal-hal berikut:
- a. Mendukung berdirinya lembaga pendidikan yang konsentrasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah
 - b. Mengoptimalkan muncul nya peraturan-peraturan dan Regulasi mengenai SDM
 - c. Sosialisasi dan Edukasi Ekonomi dan Perbankan Syariah kepada Masyarakat
4. Persiapan yang harus segera dilakukan adalah dengan melakukan hal berikut:
- a. Mengintensifkan kegiatan pelatihan mengenai sistem Ekonomi Syariah.
 - b. Peningkatan kualitas pengawas dan sistem pengawas dan praktek lembaga keuangan syariah
 - c. Pembuatan Sertifikasi oleh BNSP kepada tenaga kerja yang sudah profesional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan lembaga terkait agar mengimplementasikan langkah-langkah dan persiapan yang harus dimiliki oleh SDM berbasis syariah dalam menghadapi MEA.

2. Kepada pelaku ekonomi syariah agar menjadikan karya tulis ini sebagai bahan untuk memotivasi diri agar menjadi pelaku ekonomi syariah yang memiliki *skill* dan kompetensi sesuai dengan karakteristik SDM syariah yang telah diuraikan penulis.
3. Karya tulis bisa dijadikan bahan masukan bagi penulis lain yang berminat untuk menulis hal yang sama sekaligus bisa sebagai pembanding dan memberikan masukan serta ide - ide lain yang belum penulis paparkan dalam karya tulis ini, yang berguna untuk khasanah keilmuan.

Endnote

¹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37384/3/Chapter%20II.pdf>

²<http://www.jawapos.com/baca/opinidetil/8786/Industri-Keuangan-Syariah-Menghadapi-MEA>, 3 Februari 2015 pukul 14:00 WIB.

³<http://www.lppi.or.id/index.php/module/Editorial/id/kebutuhan-sdi-perbankan-dan-jasa-keuangan-syariah>, diakses 9 Februari 2015 pukul 12:00 WIB.

⁴Rukiah, "Urgensi Kebutuhan SDM Syariah dalam Memenuhi Kebutuhan Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Jurnal el-Qanuniy*, Volume 4, No. 2, Juli 2012, hlm.360.

⁵*Ibid.*,

⁶Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm.104.

⁷*Ibid.*, hlm.114.

⁸*Ibid.*, hlm.105.

⁹Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis*, Medan: IAIN PRESS, 2014, hlm.247-248.

¹⁰Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 873.

¹¹Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Op.cit.*, hlm. 116.

¹²[http://www.academia.edu/5966925/PENINGKATAN MSS MARKET SHARE OF SHARIA DALAM MENGHADAPI MEA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 MELALUI IM ISLAMIC MICROFINANCE DAN IB ISLAMIC BANKING DI INDONESIA](http://www.academia.edu/5966925/PENINGKATAN_MSS_MARKET_SHARE_OF_SHARIA_DALAM_MENGHADAPI_MEA_MASYARAKAT_EKONOMI_ASEAN_2015_MELALUI_IM_ISLAMIC_MICROFINANCE_DAN_IB_ISLAMIC_BANKING_DI_INDONESIA), diakses 10 Februari 2015 pukul 14:00 WIB.

¹³Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit.*, hlm. 247.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 249.

¹⁵Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 4.

¹⁶ Ibrahim Aji, "Haruskah kita meniru Malaysia?", dalam *Majalah Sharing*, Edisi 85, Thn VIII, Jakarta, Juni-Juli 2014, hlm. 10-11.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.11.

¹⁸ Firmansyah, Kesiapan SDM Perbankan Syariah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dalam seminar ilmiah mahasiswa jurusan perbankan syariah di Aula IAIN Padangsidimpuan, 20 September 2014.

¹⁹ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 226.

²⁰[http://www.bnsp.go.id/publik/content?id=56&menu=BNSP Belum Bertindak, Indonesia Bisa %27Kedodoran%27 Hadapi MEA](http://www.bnsp.go.id/publik/content?id=56&menu=BNSP_Belum_Bertindak,_Indonesia_Bisa_%27Kedodoran%27_Hadapi_MEA), diakses 12 Februari 2015 pukul 13:00 WIB.